

Eksplorasi Pola Penelitian Remuneration Policy dalam Tata Kelola Perusahaan: Sebuah Analisis Bibliometrik

Loso Judijanto
IPOSS Jakarta

Info Artikel

Article history:

Received Jan, 2026

Revised Jan, 2026

Accepted Jan, 2026

Kata Kunci:

Analisis Bibliometrik; Kebijakan Publik; Kebijakan Remunerasi; Kompensasi Eksekutif; Tata Kelola Perusahaan

Keywords:

Bibliometric Analysis; Corporate Governance; Executive Compensation; Public Policy; Remuneration Policy

ABSTRAK

Penelitian mengenai remuneration policy dalam tata kelola perusahaan (corporate governance) telah berkembang pesat dan mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, manajemen, ekonomi, hukum, dan kebijakan publik. Namun, pesatnya pertumbuhan literatur tersebut juga menimbulkan fragmentasi pengetahuan sehingga menyulitkan pemahaman terhadap pola, struktur, dan arah perkembangan penelitian secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memetakan pola penelitian mengenai kebijakan remunerasi dalam konteks tata kelola perusahaan melalui pendekatan analisis bibliometrik. Data dikumpulkan dari basis data Scopus menggunakan kata kunci yang relevan dengan remunerasi dan tata kelola perusahaan, kemudian dianalisis dengan teknik analisis sitasi, co-authorship, dan co-word menggunakan perangkat lunak VOSviewer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remunerasi merupakan tema sentral yang menghubungkan klaster ekonomi–manajerial, kebijakan publik dan regulasi, serta etika dan perilaku. Analisis temporal mengindikasikan pergeseran fokus penelitian dari pendekatan normatif dan regulatif menuju kajian berbasis dampak, seperti kinerja organisasi, kepuasan kerja, dan pengambilan keputusan. Selain itu, kolaborasi ilmiah didominasi oleh negara dan institusi dengan kapasitas riset tinggi, meskipun keterlibatan negara berkembang menunjukkan tren peningkatan. Studi ini memberikan kontribusi dengan menyajikan pemetaan komprehensif atas evolusi dan struktur intelektual penelitian remuneration policy, serta menawarkan arah penelitian masa depan yang lebih integratif dalam mendukung kebijakan remunerasi yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Research on remuneration policy within the framework of corporate governance has grown rapidly and spans multiple disciplines, including accounting, management, economics, law, and public policy. However, the rapid expansion of this literature has also led to knowledge fragmentation, making it difficult to comprehensively understand research patterns, structures, and developmental trajectories. This study aims to explore and map research patterns on remuneration policy in the context of corporate governance using a bibliometric analysis approach. Data were collected from the Scopus database using keywords related to remuneration and corporate governance and were analyzed through citation, co-authorship, and co-word analyses employing VOSviewer software. The findings reveal that remuneration serves as a central theme linking economic–managerial clusters, public policy and regulatory perspectives, as well as ethical and behavioral dimensions. Temporal analysis indicates a shift in research focus from normative and regulatory approaches toward impact-oriented studies, such as organizational performance, job satisfaction, and decision-making. In addition, scientific collaboration is dominated by countries and institutions with high research capacity, although participation from developing countries

shows an increasing trend. This study contributes by providing a comprehensive mapping of the evolution and intellectual structure of remuneration policy research and by proposing more integrative future research directions to support fair, effective, and sustainable remuneration policies.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Loso Judijanto

Institution: IPOSS Jakarta

Email: losojudijantobumn@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan tata kelola perusahaan (corporate governance) telah menjadi isu sentral dalam studi manajemen, akuntansi, dan keuangan selama beberapa dekade terakhir (Siti Hartinah & Ak, 2026). Tata kelola perusahaan dipandang sebagai seperangkat mekanisme yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar selaras dengan kepentingan para pemangku kepentingan (Sari, 2021; Siti Hartinah & Ak, 2026). Salah satu aspek krusial dalam tata kelola perusahaan adalah kebijakan remunerasi (remuneration policy), yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian sekaligus motivasi bagi manajemen puncak (Gema Ika Sari SE, 2025; Iswahyudi et al., 2023). Kebijakan ini diyakini mampu memengaruhi perilaku eksekutif, kinerja perusahaan, serta tingkat kepercayaan investor terhadap organisasi (Guritno, 2025; Wibawa, Siswanto, & Suprapti, 2024). Remuneration policy menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan masalah keagenan antara pemilik dan manajer (Nurjanah, Nafsi, Syafik, & Rosdiyati, 2025; Safitri & Hidayat, 2023). Ketidaksejajaran kepentingan antara prinsipal dan agen dapat memicu perilaku oportunistik, seperti pengambilan keputusan yang menguntungkan manajer namun merugikan pemegang saham (Gayatri, Musmini, & Adiputra, 2025). Dalam konteks ini, desain kebijakan remunerasi yang efektif diharapkan mampu menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak melalui insentif berbasis kinerja dan mekanisme pengawasan yang memadai (Rosa & Nurwahyuni, 2024). Oleh karena itu, kebijakan remunerasi sering diposisikan sebagai elemen strategis dalam sistem tata kelola perusahaan modern (Jenny Morasa et al., 2023).

Seiring meningkatnya kompleksitas lingkungan bisnis global, penelitian mengenai kebijakan remunerasi juga mengalami perkembangan yang signifikan. Studi-studi awal umumnya berfokus pada hubungan antara kompensasi eksekutif dan kinerja keuangan perusahaan. Namun, penelitian mutakhir mulai memperluas cakupan dengan mengaitkan kebijakan remunerasi dengan isu-isu lain seperti keberlanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, risiko perusahaan, struktur kepemilikan, serta regulasi dan budaya institusional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan remunerasi tidak lagi dipandang sebagai fenomena tunggal, melainkan sebagai bagian dari sistem tata kelola yang saling terhubung dan dinamis (Mulyani, Setyawibawa, Tahir, & Rasyidin, 2025). Di tengah pesatnya pertumbuhan literatur tersebut, muncul tantangan dalam memahami arah, pola, dan karakteristik penelitian kebijakan remunerasi dalam konteks tata kelola perusahaan (Riki Martusa, Joni, & Se Tin, 2023). Banyaknya publikasi dengan beragam pendekatan teoritis, metodologis, dan geografis menyebabkan fragmentasi pengetahuan (Ananda, Rizal, & Rohman, 2025). Tanpa pemetaan yang sistematis, sulit bagi peneliti untuk mengidentifikasi tema dominan, celah penelitian, serta evolusi topik dari waktu ke waktu (Tandjung, 2023). Kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan yang mampu memberikan gambaran menyeluruh terhadap lanskap penelitian yang ada (Daimatussalimah, Sari, Irma, & Revita, 2025; Sudarto, Warto, Sariyatun, & Musadad, 2025).

Analisis bibliometrik menawarkan pendekatan kuantitatif yang sistematis untuk mengeksplorasi dan memetakan perkembangan suatu bidang penelitian. Melalui teknik seperti analisis sitasi, co-citation, dan co-word analysis, bibliometrik memungkinkan peneliti mengidentifikasi tren penelitian, penulis dan jurnal berpengaruh, serta hubungan konseptual antar topik. Dalam konteks penelitian kebijakan remunerasi dan tata kelola perusahaan, analisis bibliometrik dapat berfungsi sebagai alat strategis untuk memahami struktur intelektual bidang ini serta memberikan landasan bagi pengembangan penelitian selanjutnya (Fadillah, 2025; Nurhayati et al., 2025).

Meskipun penelitian mengenai remuneration policy dalam tata kelola perusahaan telah berkembang pesat, hingga saat ini masih terbatas kajian yang secara sistematis memetakan pola dan struktur penelitian tersebut menggunakan pendekatan bibliometrik. Kurangnya pemahaman mengenai tren publikasi, tema penelitian dominan, kolaborasi ilmiah, serta evolusi konsep kebijakan remunerasi menyebabkan kesenjangan pengetahuan yang dapat menghambat kemajuan penelitian di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis komprehensif yang mampu mengeksplorasi pola penelitian remuneration policy dalam tata kelola perusahaan secara terstruktur dan berbasis data bibliografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memetakan pola penelitian mengenai remuneration policy dalam konteks tata kelola perusahaan melalui pendekatan analisis bibliometrik.

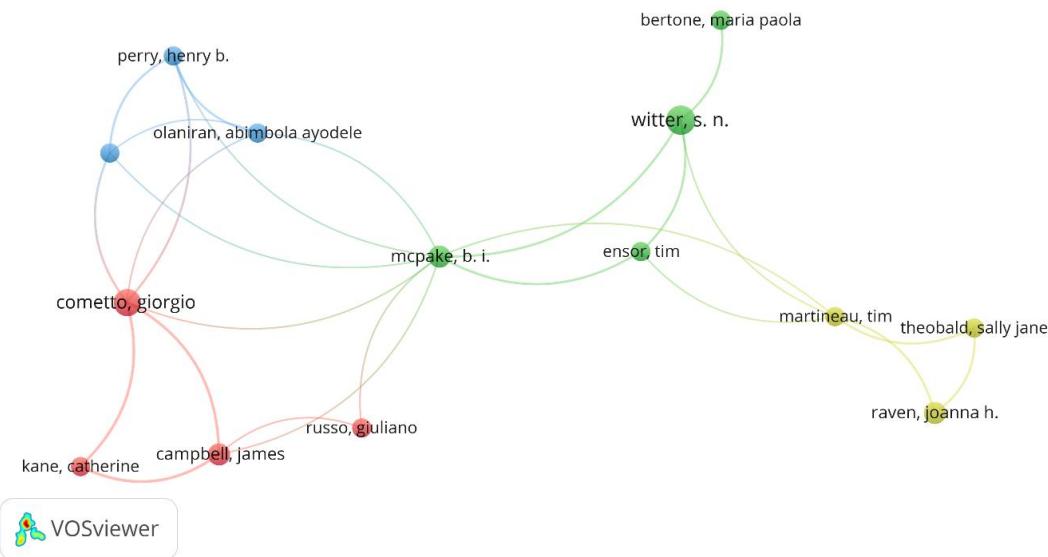
2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis bibliometrik untuk mengeksplorasi pola dan perkembangan penelitian mengenai remuneration policy dalam tata kelola perusahaan. Analisis bibliometrik dipilih karena mampu memberikan gambaran objektif dan sistematis mengenai struktur intelektual suatu bidang penelitian melalui pengolahan data bibliografis. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi tren publikasi, aktor ilmiah utama, serta hubungan konseptual antar topik penelitian berdasarkan data yang bersumber dari publikasi ilmiah terindeks.

Data penelitian dikumpulkan dari basis data ilmiah bereputasi internasional Scopus, dengan menggunakan kata kunci yang relevan, antara lain "remuneration policy", "executive compensation", dan "corporate governance". Proses penelusuran dilakukan dengan kriteria inklusi berupa artikel jurnal dan prosiding konferensi yang dipublikasikan dalam rentang waktu tertentu serta ditulis dalam bahasa Inggris. Data yang diperoleh kemudian disaring untuk menghilangkan duplikasi dan publikasi yang tidak relevan, sehingga menghasilkan kumpulan data bibliografis yang representatif dan layak dianalisis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bibliometric VOSviewer, untuk memetakan jaringan sitasi, co-citation, dan co-word. Teknik analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi penulis, jurnal, dan dokumen yang paling berpengaruh, serta untuk mengeksplorasi tema-tema penelitian dominan dan keterkaitannya. Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan secara deskriptif dan visual untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai evolusi, pola, dan arah penelitian remuneration policy dalam tata kelola perusahaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Visualisasi Kepenulisan



Gambar 1. Visualisasi Kepenulisan

Sumber: Data Diolah

Gambar 1 ini menunjukkan bahwa penelitian terkait remuneration policy dan corporate governance terstruktur dalam beberapa klaster kolaborasi yang relatif terpisah namun saling terhubung melalui penulis kunci. Terlihat bahwa McPake, B. I. berperan sebagai simpul penghubung utama (bridging author) yang mengaitkan klaster Eropa dan Anglo-Saxon, menandakan kontribusinya yang lintas komunitas riset. Di sisi kanan, klaster yang dipimpin oleh Witter, S. N. dan Ensor, Tim mencerminkan fokus kolaboratif yang kuat dan konsisten, sementara klaster kiri yang berpusat pada Cometto, Giorgio menunjukkan jaringan kolaborasi yang lebih padat namun relatif tertutup. Pola ini mengindikasikan bahwa literatur remuneration policy berkembang melalui kelompok-kelompok keahlian spesifik, dengan hanya sedikit penulis yang berfungsi sebagai penghubung antarklaster, sehingga membuka peluang riset masa depan untuk memperkuat kolaborasi lintas tema dan disiplin.

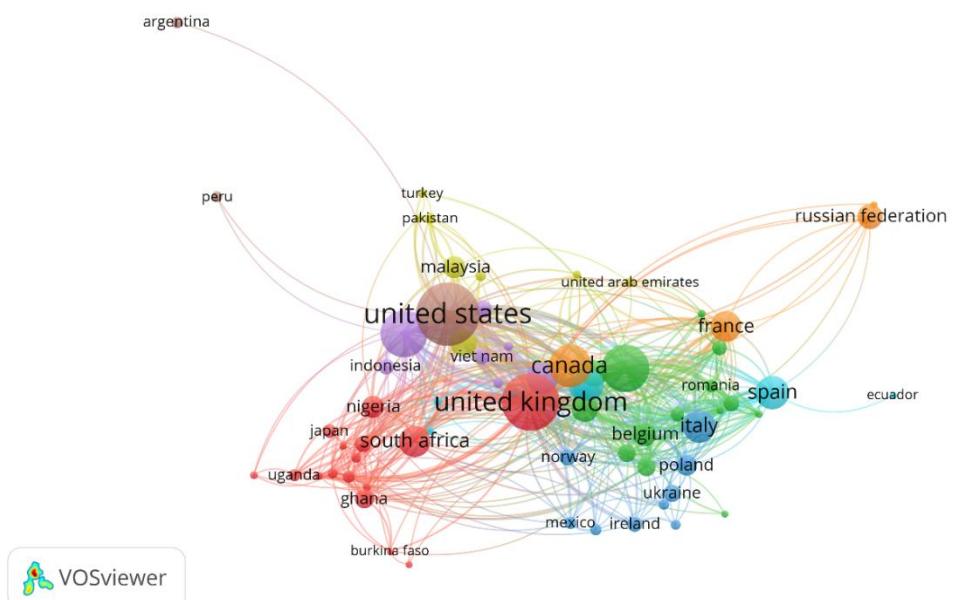


Gambar 2. Visualisasi Institusi

Sumber: Data Diolah

Gambar 2 ini menunjukkan bahwa penelitian terkait remuneration policy dan tata kelola (khususnya dalam konteks sektor kesehatan) didominasi oleh kolaborasi antar institusi akademik dan lembaga riset internasional yang relatif terkonsentrasi. University of

Toronto Faculty dan Faculty of Medicine and Health tampak berperan sebagai simpul penghubung awal, yang kemudian terhubung kuat dengan klaster institusi di Eropa, khususnya Liverpool School of Tropical Medicine dan unit Health Workforce Department. Pola hubungan yang berlapis dan saling silang ini mengindikasikan adanya kolaborasi lintas negara yang berkelanjutan dan berbasis institusi, dengan fokus riset yang cenderung terpusat pada isu kebijakan remunerasi tenaga kerja dan tata kelola sumber daya manusia. Jaringan ini mencerminkan bahwa pengembangan literatur didorong oleh institusi tertentu yang memiliki posisi strategis sebagai pusat kolaborasi global, sementara partisipasi institusi lain masih bersifat terbatas dan mengikuti jeaging utama tersebut.



Gambar 3. Visualisasi Negara

Sumber: Data Diolah

Gambar 3 ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai remuneration policy dalam tata kelola perusahaan bersifat sangat internasional dengan beberapa negara bertindak sebagai pusat kolaborasi global. United States, United Kingdom, dan Canada tampak sebagai simpul paling dominan, mencerminkan peran strategis negara-negara maju dalam memproduksi dan mengoordinasikan riset lintas negara. Di sekitarnya, negara-negara Eropa seperti France, Italy, dan Spain membentuk klaster kolaborasi yang relatif kuat dan terintegrasi, sementara negara berkembang seperti Indonesia, Nigeria, dan Malaysia berperan sebagai mitra kolaboratif yang semakin aktif. Pola ini mengindikasikan bahwa pengembangan literatur remuneration policy masih didorong oleh negara-negara dengan kapasitas riset tinggi, namun keterlibatan negara berkembang menunjukkan potensi perluasan perspektif empiris dan kontekstual dalam penelitian tata kelola perusahaan di masa depan.

3.2 Analisis Kutipan

Tabel 1. Artikel yang Paling Banyak Dikutip

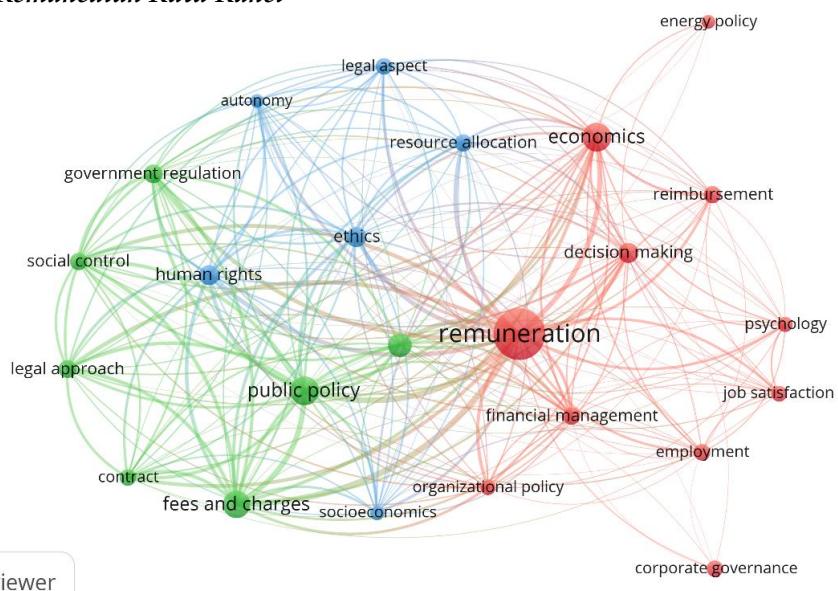
Situs	Penulis dan Tahun	Judul
679	(Li et al., 2020)	Quality of primary health care in China: challenges and recommendations
604	(Couture & Gagnon, 2010)	An analysis of feed-in tariff remuneration models: Implications for renewable energy investment
482	(Scott et al., 2018)	What do we know about community-based health worker programs? A systematic review of existing reviews on community health workers

Situs	Penulis dan Tahun	Judul
464	(Forker, 1992)	Corporate Governance and Disclosure Quality
395	(Donaghy et al., 2019)	Acceptability, benefits, and challenges of video consulting: A qualitative study in primary care
369	(Kelly, Campbell, Gong, & Scuffham, 2020)	The Internet of Things: Impact and Implications for Health Care Delivery
363	(Drennan & Ross, 2019)	Global nurse shortages - The facts, the impact and action for change
271	(Buykx, Humphreys, Wakerman, & Pashen, 2010)	Systematic review of effective retention incentives for health workers in rural and remote areas: Towards evidence-based policy
268	(Freund et al., 2015)	Skill mix, roles and remuneration in the primary care workforce: Who are the healthcare professionals in the primary care teams across the world?
254	(Anderson, 2020)	Is women's labor a commodity?

Sumber: Scopus, 2025

Tabel ini menunjukkan bahwa artikel paling banyak dikutip dalam korpus penelitian yang dianalisis didominasi oleh studi lintas disiplin yang mengaitkan isu remunerasi, tata kelola, dan kebijakan tenaga kerja dengan sektor kesehatan, energi, dan tata kelola perusahaan. Artikel dengan sitasi tertinggi berfokus pada kualitas layanan kesehatan primer, desain model remunerasi (seperti feed-in tariff), serta kebijakan insentif dan retensi tenaga kerja, yang menandakan bahwa konsep remunerasi banyak dikaji dalam kerangka kebijakan publik, sistem kesehatan, dan keberlanjutan organisasi, bukan semata-mata dalam konteks kompensasi eksekutif korporasi. Kehadiran artikel klasik tentang corporate governance and disclosure quality menunjukkan keterkaitan konseptual antara remunerasi dan mekanisme tata kelola, sementara artikel lain menyoroti dimensi sosial, teknologi, dan gender dalam pasar tenaga kerja. Pola sitasi ini mengindikasikan bahwa literatur remuneration policy berkembang secara tematik luas dan diperkaya oleh pendekatan kebijakan, institusional, dan sosial, sehingga membuka ruang bagi penelitian masa depan yang lebih terintegrasi antara tata kelola perusahaan dan kebijakan remunerasi lintas sektor.

3.3 Analisis Kemunculan Kata Kunci

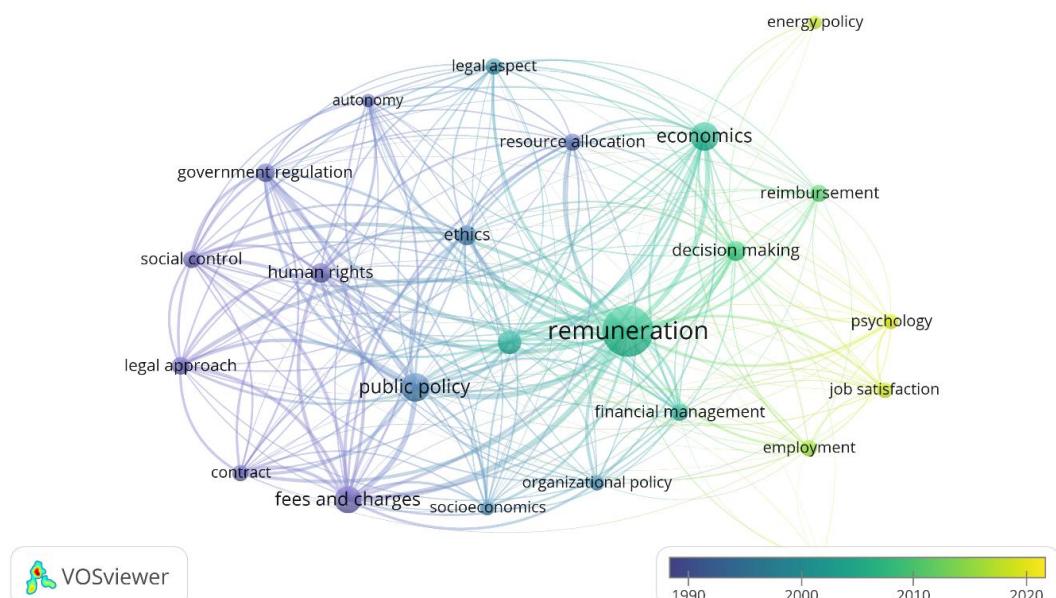


Gambar 4. Visualisasi Jaringan

Sumber: Data Diolah

Gambar 4 ini memperlihatkan bahwa konsep remuneration menjadi simpul paling sentral dalam lanskap penelitian, menandakan posisinya sebagai tema inti yang menghubungkan berbagai perspektif keilmuan. Kerapatan hubungan antar kata kunci menunjukkan bahwa remunerasi tidak dipahami secara sempit sebagai kompensasi finansial, melainkan sebagai instrumen kebijakan yang berkelindan dengan aspek ekonomi, organisasi, hukum, dan sosial dalam tata kelola. Klaster berwarna merah menonjolkan pendekatan ekonomi dan manajerial, dengan kata kunci seperti economics, decision making, financial management, employment, job satisfaction, dan corporate governance. Hal ini menunjukkan bahwa banyak penelitian memfokuskan remunerasi sebagai mekanisme insentif yang memengaruhi perilaku individu dan kinerja organisasi, sekaligus sebagai bagian dari sistem tata kelola perusahaan dan pasar tenaga kerja.

Klaster hijau merepresentasikan dimensi kebijakan publik dan regulasi, yang mencakup public policy, government regulation, legal approach, contract, fees and charges, serta human rights. Pola ini mengindikasikan bahwa remunerasi juga diposisikan sebagai isu normatif dan institusional, di mana peran negara, kerangka hukum, dan keadilan sosial menjadi landasan penting dalam perancangan dan implementasi kebijakan remunerasi. Sementara itu, klaster biru memperlihatkan keterkaitan remunerasi dengan aspek etika dan tata kelola normatif, seperti ethics, legal aspect, resource allocation, autonomy, dan social control. Klaster ini menegaskan bahwa penelitian tidak hanya menilai efektivitas ekonomi remunerasi, tetapi juga mempertimbangkan legitimasi, nilai moral, serta implikasi etis dalam pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan.

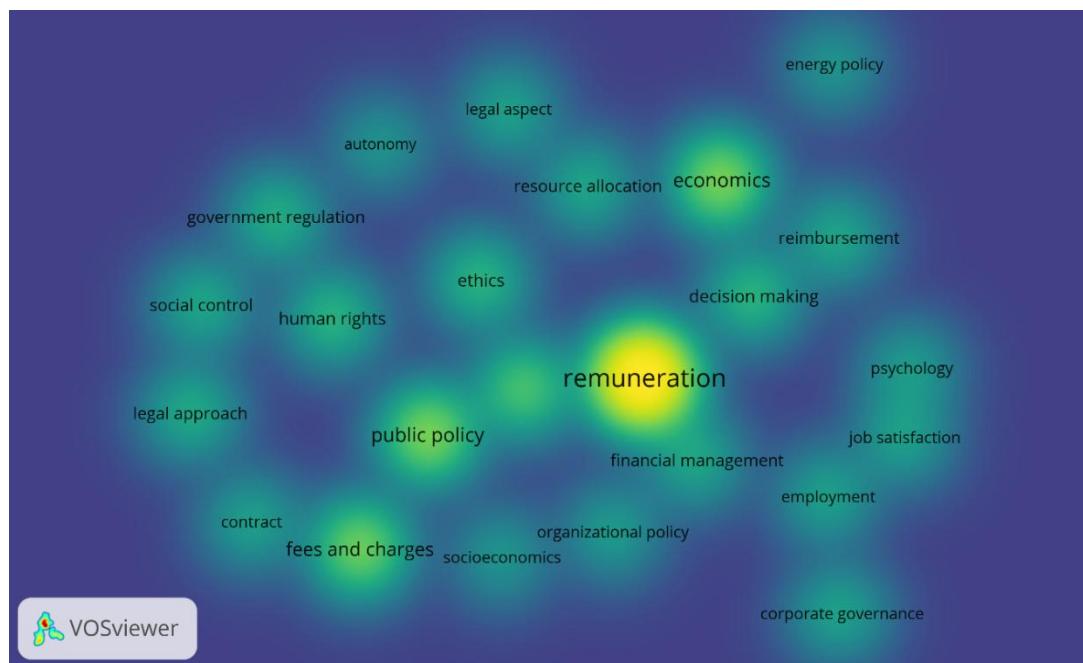


Gambar 5. Visualisasi Overlay

Sumber: Data Diolah

Gambar 5 ini memperlihatkan dinamika temporal penelitian remuneration policy, di mana gradasi warna menunjukkan pergeseran fokus kajian dari waktu ke waktu. Kata kunci berwarna lebih gelap (biru-ungu) seperti fees and charges, contract, legal approach, government regulation, dan public policy merepresentasikan fase awal penelitian yang menempatkan remunerasi terutama sebagai isu regulasi, hukum, dan kebijakan publik, dengan penekanan pada kerangka normatif dan institusional. Pada fase transisi (warna hijau), penelitian mulai mengintegrasikan perspektif ekonomi dan organisasi, ditandai dengan kemunculan kata kunci seperti economics, resource allocation, decision making, financial management, dan organizational policy. Perkembangan ini menunjukkan

pergeseran dari pendekatan normatif menuju analisis yang lebih manajerial dan rasional, di mana remunerasi dipahami sebagai instrumen pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan dalam organisasi dan sistem tata kelola. Sementara itu, kata kunci berwarna lebih terang (kuning) seperti job satisfaction, psychology, employment, dan energy policy mencerminkan agenda riset yang relatif lebih mutakhir. Fokus penelitian terkini cenderung menyoroti dampak remunerasi terhadap perilaku individu, kepuasan kerja, serta implikasinya dalam konteks sektoral dan keberlanjutan, menandakan semakin kuatnya pendekatan multidisipliner yang menggabungkan ekonomi, psikologi, dan tata kelola dalam studi remuneration policy.



Gambar 6. Visualisasi Densitas

Sumber: Data Diolah

Gambar 6 ini menunjukkan bahwa remuneration merupakan tema dengan kepadatan tertinggi dalam lanskap penelitian, tercermin dari warna paling terang yang terkonsentrasi di pusat peta. Hal ini menandakan bahwa remunerasi menjadi fokus utama yang paling sering dibahas dan paling kuat keterkaitannya dengan berbagai konsep lain. Di sekelilingnya, topik seperti economics, public policy, financial management, dan decision making juga memiliki kepadatan relatif tinggi, menunjukkan bahwa diskursus remunerasi banyak di tempatkan dalam kerangka ekonomi dan kebijakan pengelolaan sumber daya. Sementara itu, area dengan kepadatan menengah hingga rendah (seperti human rights, ethics, government regulation, job satisfaction, psychology, dan corporate governance) menunjukkan bahwa aspek normatif, perilaku, dan tata kelola meskipun relevan, masih relatif kurang dieksplorasi secara mendalam dibandingkan pendekatan ekonomi. Pola ini mengindikasikan peluang riset masa depan untuk memperkuat integrasi antara dimensi ekonomi, etika, psikologis, dan tata kelola perusahaan dalam kajian remuneration policy agar pemahaman yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan seimbang.

3.4 Pembahasan

a. Ringkasan Temuan

Hasil analisis bibliometrik menunjukkan bahwa penelitian mengenai remuneration policy berkembang secara signifikan dan bersifat multidisipliner, dengan remunerasi berperan sebagai tema sentral yang menghubungkan perspektif ekonomi, kebijakan publik, manajemen, hukum, dan aspek sosial. Pemetaan kata kunci

mengindikasikan adanya beberapa klaster utama, yaitu klaster ekonomi-manajerial, klaster kebijakan publik dan regulasi, serta klaster etika dan perilaku. Selain itu, analisis jejaring kolaborasi penulis, institusi, dan negara memperlihatkan bahwa negara dan institusi dengan kapasitas riset tinggi mendominasi produksi pengetahuan, namun keterlibatan negara berkembang semakin meningkat. Secara temporal, fokus penelitian juga mengalami pergeseran dari pendekatan normatif dan regulatif menuju isu dampak remunerasi terhadap kinerja organisasi, kepuasan kerja, dan pengambilan keputusan.

b. Implikasi Praktis

Temuan studi ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan, regulator, dan praktisi organisasi. Bagi pemerintah dan regulator, hasil ini menegaskan bahwa kebijakan remunerasi perlu dirancang tidak hanya berdasarkan efisiensi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, etika, dan kesejahteraan tenaga kerja. Bagi manajemen organisasi dan perusahaan, pemetaan tema menunjukkan bahwa sistem remunerasi yang efektif berkaitan erat dengan kepuasan kerja, perilaku karyawan, dan tata kelola perusahaan, sehingga pendekatan berbasis kinerja semata perlu dilengkapi dengan pertimbangan psikologis dan institusional. Dengan demikian, hasil studi ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan remunerasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

c. Kontribusi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyajikan gambaran menyeluruh mengenai struktur intelektual dan evolusi penelitian remuneration policy. Studi ini memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa kajian remunerasi tidak berdiri sendiri, melainkan beririsan dengan teori agensi, teori tata kelola perusahaan, ekonomi kelembagaan, serta perspektif etika dan hak asasi manusia. Pendekatan bibliometrik yang digunakan juga membantu mengidentifikasi tema-tema dominan dan tema yang masih relatif kurang dieksplorasi, sehingga memperjelas posisi penelitian remunerasi dalam kerangka tata kelola perusahaan dan kebijakan publik secara lebih luas.

d. Limitasi

Meskipun memberikan pemetaan yang komprehensif, studi ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis dibatasi pada satu basis data utama sehingga publikasi yang tidak terindeks dalam basis data tersebut berpotensi tidak terakomodasi. Kedua, metode bibliometrik berfokus pada pola kuantitatif publikasi dan sitasi, sehingga belum menggali secara mendalam konteks substantif dan kualitas argumen dalam masing-masing artikel. Ketiga, variasi istilah dan kata kunci yang digunakan oleh penulis dapat memengaruhi hasil pemetaan tema. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan analisis bibliometrik dengan tinjauan literatur sistematis atau pendekatan kualitatif agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kebijakan remunerasi.

4. KESIMPULAN

Studi bibliometrik ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai remuneration policy telah berkembang secara dinamis dan multidisipliner, dengan remunerasi menempati posisi sentral dalam diskursus tata kelola perusahaan, kebijakan publik, dan manajemen organisasi. Pemetaan literatur mengungkapkan adanya pergeseran fokus kajian dari pendekatan normatif dan regulatif menuju analisis yang lebih ekonomis, perilaku, dan berbasis dampak, seperti kinerja organisasi dan kepuasan kerja. Selain itu, pola kolaborasi global menegaskan dominasi negara dan institusi dengan kapasitas riset tinggi, disertai meningkatnya kontribusi dari negara berkembang yang memperkaya konteks empiris penelitian. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memberikan gambaran komprehensif tentang struktur dan evolusi penelitian remuneration policy, tetapi juga membuka

peluang riset lanjutan yang lebih integratif dan kontekstual untuk mendukung perumusan kebijakan remunerasi yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Y., Rizal, E., & Rohman, A. S. (2025). Pemetaan pengetahuan terhadap perkembangan penelitian kebutuhan informasi pada database Scopus menggunakan VOSViewer. *Informatio: Journal of Library and Information Science*, 5(1), 49–66.
- Anderson, E. S. (2020). Is women's labor a commodity? In *Women, Medicine, Ethics and the Law* (pp. 167–188). Routledge.
- Buykx, P., Humphreys, J., Wakeman, J., & Pashen, D. (2010). Systematic review of effective retention incentives for health workers in rural and remote areas: towards evidence-based policy. *Australian Journal of Rural Health*, 18(3), 102–109.
- Couture, T., & Gagnon, Y. (2010). An analysis of feed-in tariff remuneration models: Implications for renewable energy investment. *Energy Policy*, 38(2), 955–965.
- Daimatussalimah, D., Sari, S. N., Irma, A., & Revita, R. (2025). Kompetensi Profesional Guru dalam Lanskap Pendidikan yang Berbeda: Studi di Pesantren dan Sekolah Umum. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 155–164.
- Donaghy, E., Atherton, H., Hammersley, V., McNeilly, H., Bikker, A., Robbins, L., ... McKinstry, B. (2019). Acceptability, benefits, and challenges of video consulting: a qualitative study in primary care. *British Journal of General Practice*, 69(686), e586–e594.
- Drennan, V. M., & Ross, F. (2019). Global nurse shortages—the facts, the impact and action for change. *British Medical Bulletin*, 130(1), 25–37.
- Fadillah, A. R. (2025). Menelisik Tren Global Tata Kelola Perbankan: Analisis Bibliometrik atas Pola Penelitian. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 8(1), 231–242.
- Forker, J. J. (1992). Corporate governance and disclosure quality. *Accounting and Business Research*, 22(86), 111–124.
- Freund, T., Everett, C., Griffiths, P., Hudon, C., Naccarella, L., & Laurant, M. (2015). Skill mix, roles and remuneration in the primary care workforce: who are the healthcare professionals in the primary care teams across the world? *International Journal of Nursing Studies*, 52(3), 727–743.
- Gayatri, N. P. A. P., Musmini, L. S., & Adiputra, I. M. P. (2025). Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Asing Dan Komisaris Independen Terhadap Kebijakan Dividen di Indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 9(3), 1667–1689.
- Gema Ika Sari SE, M. (2025). *Corporate Governance*. Penerbit Naga Pustaka.
- Guritno, D. S. (2025). *Pengaruh Karakteristik Chief Executive Officer Terhadap Kinerja Keuangan dan Kinerja Non Keuangan Perusahaan dengan Moderasi Asimetri Informasi pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Tahun 2018-2023*. UNS (Sebelas Maret University).
- Iswhayudi, M. S., Haryadi, D., Napisah, S., Subagja, A. D., Waty, E., Firdaus, A., ... Afifah, N. (2023). *Manajemen Pengembangan Bisnis: Teori Dan Panduan Komprehensif*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jenny Morasa, S. E., Tirayoh, V. Z., Haryanto Sabijono, S. E., I Gusti Agus Eka Widiana, S. E., Sahensolar, I. K., Ak, S., ... Harke Revo Leonard Polii, S. E. (2023). *Tata Kelola Korporat Yang Efektif Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Mega Press Nusantara.
- Kelly, J. T., Campbell, K. L., Gong, E., & Scuffham, P. (2020). The Internet of Things: Impact and implications for health care delivery. *Journal of Medical Internet Research*, 22(11), e20135.
- Li, X., Krumholz, H. M., Yip, W., Cheng, K. K., De Maeseneer, J., Meng, Q., ... Su, M. (2020). Quality of primary health care in China: challenges and recommendations. *The Lancet*, 395(10239), 1802–1812.
- Mulyani, S., Setyawibawa, R. A., Tahir, R., & Rasyidin, T. (2025). *Transformasi Organisasi dan Politik Kekuasaan di Era Post Modern (Berfokus Ke Manajemen Sumber Daya)*. Serasi Media Teknologi.
- Nurhayati, S., Judijanto, L., Sriwardiningsih, E., Syarifah, S., Juniarti, A. P., Hidayat, C., & Jakaria, Y.

- (2025). *Desain Riset dan Literasi Data*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Nurjanah, F., Nafsi, A. I., Syafik, M., & Rosdiyati, R. (2025). Pengaruh Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ekobismen*, 5(2), 246–258.
- Riki Martusa, S. E., Joni, S. E., & Se Tin, S. E. (2023). *Tata Kelola Perusahaan: Sebuah Perspektif Sustainability*. Penerbit Andi.
- Rosa, M. A., & Nurwahyuni, A. (2024). Kajian Literatur Terhadap Remunerasi Dan Kinerja Tenaga Kesehatan: Dampak Dan Tantangan. *Journal of Syntax Literate*, 9(10).
- Safitri, S., & Hidayat, T. (2023). Pengaruh Ownership Structure, Pemberian Remunerasi Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020: Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Accounting, Management and Islamic Economics*, 1(2), 487–498.
- Sari, I. P. (2021). Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 90–97.
- Scott, K., Beckham, S. W., Gross, M., Pariyo, G., Rao, K. D., Cometto, G., & Perry, H. B. (2018). What do we know about community-based health worker programs? A systematic review of existing reviews on community health workers. *Human Resources for Health*, 16(1), 39.
- Siti Martinah, S. E., & Ak, M. (2026). Perusahaan (Corporate. *Teori Akuntansi: Konsep, Regulasi, Dan Isu Kontemporer*, 113.
- Sudarto, S., Warto, W., Sariyatun, S., & Musadad, A. A. (2025). Integrasi Pedagogi Reflektif dan Eco-Pedagogy dalam Konstruksi Kausalitas Sejarah: Membangun Kesadaran Nilai Lingkungan melalui Landscape Budaya dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Artefak*, 12(1), 213–236.
- Tandjung, T. D. (2023). *Pemodelan Topik dengan Latent-Dirichlet Allocation untuk penemuan State-of-the-Art dalam Keilmuan*. Universitas Islam Indonesia.
- Wibawa, E. S., Siswanto, E., & Suprapti, S. (2024). Peran Karakter Eksekutif, Performa Keuangan, dan Ukuran Perusahaan dalam Pengambilan Keputusan Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*, 4(1), 35–43.